

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Keadaan Geografis

Provinsi Jawa Timur terletak antara 111,0' BT hingga 114,4' BT dan garis lintang 7,12 LS dan 8,48' LS dengan luas wilayah 47.157,72 km². Secara umum Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur dataran dengan proporsi lebih luas yang dimana mencakup sekitar 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur dan 10% merupakan wilayah kepulauan Madura. Provinsi Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau yang tak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 km. berikut adalah batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur :

Batas daerah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa dan pulau Kalimantan, tepatnya Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali / Provinsi Bali

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

Kemiskinan

Angka kemiskinan di Jawa Timur di tahun 2015 berada di angka 12,34% kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya angka kemiskinan di Jawa Timur cenderung mengalami penurunan. Turunya tingkat kemiskinan dilihat dari kondisi tingkat kesejahteraan dan status tempat tinggal. Turunya angka kemiskinan di Jawa Timur tidak diimbangi dengan tingkat pemerataan pendapatan yang baik, dimana angka Gini Ratio di Jawa Timur pada tahun 2011 berada pada 0,36% kemudian naik menjadi 0,37% di tahun 2014 dan di tahun 2015 terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,42% hal ini harus segera diatasi agar tingkat kesenjangan pendapatan tidak semakin melebar yang nantinya akan berdampak buruk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Kalau kita lihat dari tabel A.1 bisa kita ketahui bahwa tingkat kemiskinan tiap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur berbeda-beda yang dimana Kabupaten-Kabupaten kecil yang jauh dari pusat perekonomian mengalami tingkat kemiskinan yang tergolong masih tinggi bila dibandingkan dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo yang dimana Sidoarjo dan Surabaya merupakan pusat perekonomian di Jawa Timur.

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, hal ini tidak hanya terjadi pada Negara

berkembang saja melainkan hampir seluruh Negara menghadapi permasalahan yang sama. Menurut Lincoln Arsyad (1997), banyak Negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan permasalahan kemiskinan.

Kalau kita lihat dari tabel A.1 bisa kita lihat tingkat kesenjangan pendapatan tiap Provinsi di Jawa Timur masih cukup tinggi di setiap kabupaten dan kota hal ini harus benar benar diperhatikan oleh pemerintah daerah agar tingkat kesenjangan pendapatan tidak terlalu melebar dengan cara mempermudah kredit dan pembiayaan lainnya.

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, upaya-upaya pembangunan harus dilaksanakan, bukan hanya dalam konteks ekonomi saja, tetapi juga dari perbaikan infrastruktur, pelayanan masyarakat yang memadai, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, dalam segi pembangunan jangan hanya berpusat dalam dalam wilayah wilayah yang tergolong maju namun harus merata khususnya daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang parah dan selalu naik turun (fluktuasi) dalam tiap tahunnya, begitu juga dengan proses pembangunan ada yang harus diprioritaskan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. karna suatu Negara ataupun daerah

dapat dikatakan berhasil dalam kegiatan pembangunan ekonomi bisa dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin.

Dalam tabel A.1 bisa kita ketahui bahwa tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki nilai PDRB yang berbeda di tiap tahunnya, PDRB tertinggi pada tahun 2011 berada di kota Surabaya yang dimana nilainya sebesar 247687 milyar dan mengalami kemajuan pesat di tahun 2015 yang berada di nilai 324228 milyar sedangkan PDRB terendah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 sebesar 3038 milyar dan tahun 2015 sebesar 3857 yang berada di Kota Blitar.

Dari tabel A.1 bisa kita lihat bahwa Jumlah Penduduk tiap kabupaten memiliki nilai yang berbeda dan mengalami kemajuan pesat dimana rata-rata setiap kabupaten kota memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Sedangkan kita semua tahu kalau dalam pembangunan ekonomi, meningkatnya penduduk disuatu daerah dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat, dapat dikatakan menjadi faktor pendorong apabila membuat daya beli masyarakat meningkat yang membuat perusahaan ingin menambah jumlah produksi mereka yang dimana akan terbukanya lapangan pekerjaan dan berdampak penyerapan tenaga kerja yang tinggi juga dalam daerah tersebut.